



Pola Pembentukan Opini oleh Perangkat Desa terhadap Masyarakat melalui Media Sosial di Desa Telukan

Elis Aloysius¹, Romi Mesra²

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka

aloysius069106@gmail.com

²Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

romimesra@unima.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the pattern of opinion formation by village officials through social media in Telukan Village, Grogol Subdistrict, Sukoharjo Regency, Central Java. Using a descriptive qualitative approach, this research was conducted through in-depth interviews and observations involving village officials, community leaders, and residents of Telukan Village. The research focus explores digital communication strategies employed by the village government in disseminating information, building interactions, and considering the demographic diversity of the community. The research findings reveal three patterns of opinion formation: structured information dissemination through WhatsApp Group, Instagram, and Facebook to create openness and government transparency, interactive communication that enables the community to provide direct feedback, audience segmentation based on demographic characteristics with different approaches for each age group. This research identifies challenges in implementing digital communication strategies, such as participation inequality and digital accessibility constraints. The digital approach has sufficiently helped improve transparency, participation, and information efficiency among Telukan Village residents. Research recommendations include developing digital literacy, designing inclusive feedback mechanisms, and integrating digital communication with traditional approaches to strengthen village governance communication patterns in the increasingly complex contemporary digital era.

Keywords: social media, digital communication, village governance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pembentukan opini perangkat desa melalui media sosial di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Telukan. Fokus penelitian mengeksplorasi strategi komunikasi digital pemerintah desa dalam menyebarkan informasi, membangun interaksi, dan mempertimbangkan keberagaman demografis masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan tiga pola pembentukan opini pertama, penyebaran informasi terstruktur melalui *WhatsApp Group*, *Instagram*, dan *Facebook* untuk menciptakan keterbukaan dan transparansi pemerintahan. Kedua, komunikasi interaktif yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan langsung. Ketiga, segmentasi audiens berdasarkan karakteristik demografis dengan pendekatan berbeda untuk setiap kelompok usia. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan implementasi strategi komunikasi digital, seperti ketimpangan partisipasi dan kendala aksesibilitas digital. Pendekatan digital sudah cukup membantu meningkatkan transparansi dan partisipasi, dan efisiensi informasi warga desa Telukan. Rekomendasi penelitian mencakup pengembangan literasi digital, perancangan mekanisme umpan balik inklusif, dan integrasi komunikasi digital dengan pendekatan tradisional untuk memperkuat pola komunikasi pemerintahan desa di era digital kontemporer yang semakin kompleks.

Kata kunci: *media sosial, pemerintahan desa, komunikasi digital*

A. Pendahuluan

Pada masa sekarang ini dikenal dengan era digitalisasi, hal ini mengubah pola komunikasi pemerintah, baik pemerintah di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah bahkan pada tingkat desa. Transformasi digital dapat membuka peluang bagi pemerintah desa dalam membangun komunikasi dengan masyarakat (Nurdin & Rusli, 2022). Media sosial merupakan salah satu produk teknologi informasi yang telah menjadi saluran komunikasi yang strategis bagi perangkat desa dalam menyebarkan informasi dan pembentukan opini publik.

Desa Telukan yang terletak di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu desa yang terletak di Jawa Tengah yang mulai aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Masyarakat Desa Telukan memiliki karakteristik yang beragam diantaranya petani, pedagang, hingga pekerja industri (BPS Kabupaten Sukoharjo, 2022). Dengan adanya keberagaman Masyarakat yang ada, menjadi tantangan tersendiri bagi perangkat desa dalam penyampaian informasi secara efektif. Penelitian Wati dan Prajarto (2020) yang berjudul "Pemanfaatan *WhatsApp Group* oleh Pemerintah Desa", mengidentifikasi *WhatsApp Group* (WAG) menjadi salah satu sarana komunikasi yang efektif bagi pemerintah desa dalam menyebarkan informasi pembangunan. Studi Wati dan Pjajarto menemukan pola interaksi dan alur informasi yang terbangun antara perangkat desa dengan masyarakat melalui aplikasi pesan instan, yang kini menjadi alat komunikasi signifikan dalam tata kelola desa modern.

Penelitian Mesra dan Dolonseda (2023) yang berjudul "Pemanfaatan Media Sosial dan *E-commerce* Sebagai Media Pemasaran" mengungkapkan beberapa temuan utama mengenai pandemi Covid-19 mempercepat adopsi digital di kalangan pelaku usaha kecil, *Instagram*, *Facebook*, dan *WhatsApp* menjadi platform media sosial dominan sementara *Shopee* dan

Tokopedia sebagai *e-commerce* utama. Media sosial berperan sebagai alat demokratisasi pemasaran dengan modal minimal, terdapat kesenjangan digital signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, konten dengan nilai kearifan lokal memiliki daya tarik khusus dalam pemasaran digital, jejaring sosial informal berperan penting dalam transfer pengetahuan digital di daerah pedesaan. Tantangan utama adopsi digital di desa meliputi akses internet, literasi digital, dan logistic, serta media sosial berpotensi menjembatani kesenjangan pasar bagi produk-produk desa.

Fenomena penggunaan media sosial oleh perangkat desa Telukan merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk di kaji karena menunjukkan transformasi komunikasi pemerintahan di tingkat desa dengan model digital. Media sosial memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang lebih dinamis antara pemerintah dan masyarakat (Pratiwi & Nur, 2021), berbeda dengan saluran komunikasi tradisional yang cenderung bersifat satu arah. Dalam komunikasi konvensional mengandalkan pertemuan fisik seperti rembug desa atau pengumuman melalui papan informasi, perangkat desa kini aktif menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan kegiatan sosial, kebijakan, program, dan gagasan pembangunan. Observasi awal mengungkapkan bahwa pesan-pesan yang disampaikan melalui *Facebook*, *WhatsApp Group*, dan *Instagram* tidak hanya sekedar bersifat informatif, tetapi juga secara strategis dirancang untuk membentuk opini masyarakat terhadap agenda pemerintahan desa. Menariknya, terlihat adanya perbedaan strategi penyampaian pesan antara platform satu dengan lainnya, di mana konten visual dominan di *Instagram*, narasi panjang di *Facebook*, sedangkan diskusi interaktif dan informasi lebih banyak terjadi di *WhatsApp Group*.

Realitas di lapangan juga menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi digital, sebagian masyarakat terutama generasi muda dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, berinteraksi aktif dalam ruang digital yang dibentuk oleh perangkat desa. Sementara itu, kelompok lansia dan warga dengan akses yang terbatas terhadap teknologi cenderung tetap bergantung pada saluran komunikasi konvensional. Fenomena ini menciptakan fragmentasi informasi dan berpotensi menciptakan celah dalam konsensus sosial tentang berbagai isu pembangunan desa. Penelitian ini menjadi penting karena belum ada kajian yang secara khusus menganalisis pola pembentukan opini oleh perangkat desa di Desa Telukan, serta bagaimana polarisasi pandangan masyarakat terbentuk dalam merespon komunikasi digital tersebut. Implikasi dari penelitian ini tidak hanya akan memperkaya kajian komunikasi pemerintahan desa di era digital, tetapi juga memberikan landasan empiris bagi pengembangan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan efektif dalam tata kelola desa modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pemahaman secara mendalam tentang fenomena sosial, dalam hal ini pola pembentukan opini perangkat desa melalui media sosial. Penelitian kualitatif cocok digunakan dalam penelitian ini, karena secara spesifik dilaksanakan di salah satu desa yaitu di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Telukan merupakan salah satu desa yang sudah aktif menggunakan media sosial dalam penyampaian informasi pemerintahan, serta memungkinkan peneliti untuk mendapatkan

gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai pola pembentukan opini perangkat desa terhadap masyarakat melalui media sosial.

Penelitian ini menggunakan analisis tematik untuk mengolah data kualitatif melalui wawancara dan observasi di Desa Telukan. Wawancara dilakukan terhadap kepala desa dan staf (sebagai admin media sosial desa), tokoh masyarakat Desa Telukan, dan warga. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti bersifat fleksibel dan terstruktur terfokus pada topik utama. Peneliti juga melakukan observasi secara mendalam terhadap program serta kegiatan sosial pemerintahan desa. Hasil wawancara dan observasi di tulis secara lengkap lalu dikelompokkan berdasarkan sumber, selanjutnya mengidentifikasi konsep-konsep kunci, seperti strategi penyebaran informasi, interaksi di media sosial, dan respons masyarakat. Kemudian dikelompokkan menjadi tema yang lebih luas, misalnya peran media sosial dalam transparansi pemerintahan, partisipasi warga, dan segmentasi audiens.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara terhadap perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa Telukan, serta observasi mendalam terhadap kegiatan dan program perangkat desa yang sudah terealisasi, dapat diidentifikasi tiga pola utama pembentukan opini perangkat desa melalui media sosial:

1. Penyebaran Informasi Terstruktur melalui Media Sosial

Dalam keterangannya S (52 Tahun), mengatakan bahwa,

“...desa Telukan saat ini memanfaatkan media sosial *Instagram* dan *Facebook* dalam penyebaran informasi yang dibagikan melalui konten-kontennya, konten yang dibagikan berisi tentang sosial, pembangunan, dan pemerintahan. Dengan adanya media sosial sangat membantu dalam penyebaran informasi terhadap warga saya, juga dapat menciptakan keterbukaan dan transparansi” (Hasil wawancara 9 Mei 2025).

Kemudian S (52 Tahun) juga menambahkan bahwa,

“...penggunaan media sosial terdapat beberapa tantangan karena masyarakat Telukan sangat majemuk, ada yang berpendapat positif terhadap konten yang dibagikan dan ada juga yang menanggapi negatif atau dalam bahasa Jawa “*maido*”. Akan tetapi secara umum mendapat respons positif dari warga”.

Dari hasil observasi peneliti, terlihat bahwa perangkat Desa Telukan telah aktif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi publik. Pengelolaan akun media sosial desa, seperti *WhatsApp Group*, *Instagram*, dan *Facebook*, dilakukan oleh perangkat desa yang ditunjuk secara langsung, meskipun belum memiliki struktur resmi sebagai admin media sosial.

Peneliti juga menemukan bahwa perangkat desa tampak menjalankan peran ganda, tidak hanya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai pengelola konten digital. Seperti dalam pernyataannya T (32 Tahun) merupakan staf kepala desa mengatakan bahwa,

“...kalau saya ‘*tak sambu*’ selain membantu kepala desa juga mengurus akun media sosial milik desa” (Hasil wawancara 9 Mei 2025).

Perangkat desa juga terlihat secara rutin mengunggah dokumentasi kegiatan desa, seperti pembangunan, rapat, dan pelayanan masyarakat. Informasi disajikan dengan bahasa sederhana dan yang mudah dipahami untuk memastikan kemudahan dalam pemahaman terhadap informasi tersebut bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut pendapat peneliti bahwa pemerintah Desa Telukan telah berhasil membangun sistem penyebaran informasi yang terstruktur melalui berbagai platform media sosial. Media sosial digunakan secara efektif untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan sosial, pembangunan desa, dan kebijakan pemerintahan. Pendekatan ini tidak hanya menjamin transparansi informasi, tetapi juga memudahkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, di balik kesuksesan ini, terdapat beberapa catatan penting. Meskipun informasi tersebar luas, belum ada mekanisme yang memastikan bahwa konten tersebut benar-benar dipahami dan ditindak lanjuti oleh semua warga. Selain itu, kelompok masyarakat dengan keterbatasan literasi digital mungkin kesulitan memahami informasi yang disampaikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa perlu mengembangkan fitur tanya jawab terstruktur dalam setiap informasi yang diberikan dan mengadakan sosialisasi berkala. Tanpa upaya ini, informasi yang disebar akan berisiko hanya menjadi formalitas saja tanpa dampak nyata terhadap partisipasi masyarakat.

2. Komunikasi Dua Arah dan Partisipasi Aktif Warga

Dalam pernyataannya AR (45 Tahun) mengatakan bahwa,

“...sebagai salah satu tokoh masyarakat di salah satu RT di Desa Telukan, saya sangat merespon baik terhadap komunikasi yang dilakukan perangkat desa terkait dengan memberikan informasi atau pengumuman melalui media sosial, karena sangat menunjang terhadap *update* informasi. Termasuk yang belum lama ini *di-share* oleh perangkat desa melalui grup WhatsApp yaitu tentang program pemerintah, terkait pembentukan koperasi dan posyandu bagi lansia” (Hasil wawancara 9 Mei 2025).

Kemudian AR (45 Tahun) juga menambahkan bahwa,

“...saya tergabung dalam grup WhatsApp, anggotanya perangkat desa, tokoh masyarakat, Babinsa dan Babinkamtibmas. Sebagai ketua RT saya mempunyai kewajiban meneruskan informasi kepada warga terutama kepada lansia sebagai target program ‘posyandu bagi lansia’ dari pemerintah.

Berdasarkan observasi terhadap peran tokoh masyarakat di Desa Telukan, terlihat bahwa tokoh masyarakat seperti AR (45 Tahun) memiliki peran penting dalam menjembatani informasi antara perangkat desa dengan warga. Tokoh masyarakat ini tergabung dalam grup WhatsApp yang juga beranggotakan perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Grup WhatsApp tersebut menjadi salah satu saluran komunikasi yang aktif digunakan untuk menyampaikan informasi terkait program-program pemerintah desa.

AR (45 Tahun) tampak aktif dalam menyimak dan menyebarkan kembali informasi yang dibagikan melalui media sosial maupun grup WhatsApp, khususnya kepada kalangan lanjut

usia yang menjadi sasaran dari beberapa program pemerintah desa. Melalui keterlibatan tokoh masyarakat, penyebaran informasi menjadi lebih efektif, terutama bagi warga yang tidak aktif menggunakan media sosial. Salah tokoh masyarakat L (53 Tahun) juga mengungkapkan bahwa,

“...saya kadang dilibatkan dalam diskusi bersama ketua RT dan perangkat desa terkait perencanaan program-program desa, diskusi kadang dilakukan melalui grup WhatsApp dan kadang juga saat pertemuan tatap muka bersama ketua RT dan warga setempat yang di tuakan” (Hasil wawancara 10 Mei 2025).

Menurut pendapat peneliti, media sosial di Desa Telukan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi satu arah, tetapi juga sebagai platform interaktif antara pemerintah desa dan warga. Perangkat desa secara aktif merespons komentar, pertanyaan, dan masukan dari masyarakat, menciptakan ruang dialog yang partisipatif. Interaksi dua arah ini telah meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa dan mendorong partisipasi

aktif dalam program pembangunan. Namun, tantangan yang muncul adalah partisipasi yang tidak merata. Diskusi sering didominasi oleh segelintir warga yang aktif secara digital, sementara kelompok marginal seperti lansia atau mereka yang kurang melek teknologi cenderung pasif. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa perlu mengadakan jadwal rutin sesi percakapan daring secara langsung dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai mediator bagi kelompok yang kurang aktif. Jika interaksi ini hanya bersifat simbolis tanpa tindak lanjut nyata, kepercayaan warga terhadap pemerintah desa bisa menurun

3. Pengelompokan Audiens Berdasarkan Karakteristik Demografis

Dalam wawancaranya DF (25 Tahun) menyampaikan bahwa,

“...adanya media sosial milik desa, seperti *Instagram* dan *Facebook*, sangat membantu dalam mendapat informasi tentang kegiatan dan pelayanan desa. Saya rasa penyampaian informasi melalui media sosial lebih praktis dan mudah diakses. Bahkan saya kadang ikut berkomentar pada konten yang ada di *Instagram*, bahkan membagikan ulang unggahan tersebut” (Hasil wawancara 11 Mei 2025).

Kemudian DF (25 Tahun) juga mengatakan bahwa,

“saya selalu mengikuti Instagram desa, karena semua informasi penting biasanya diunggah di sana. Jadi saya tidak perlu datang ke kantor desa, cukup lihat di HP”.

Dalam wawancara warga lainnya AM (53 tahun) menyampaikan bahwa,

“...saya tidak menggunakan media sosial seperti *Instagram* atau *Facebook*. Sebagian besar informasi saya peroleh melalui grup WhatsApp warga, atau pertemuan warga dalam kegiatan lingkungan” (Hasil wawancara 11 Mei 2025).

Kemudian AM (53 Tahun) juga mengatakan bahwa,

“...saya tidak buka *Facebook* atau *Instagram*, ‘wong’ saya tidak punya, tapi info dari desa tetap saya tahu, biasanya lewat grup WA warga atau pas ada kumpulan warga. Kadang juga ketua RT kasih tahu langsung kalau ada informasi baru”.

Berdasarkan observasi Peneliti di lingkungan Desa Telukan dan mengamati pola interaksi warga dengan sistem komunikasi digital yang diterapkan oleh pemerintah desa, peneliti menemukan terdapat perbedaan perilaku komunikasi yang cukup mencolok antara kelompok usia produktif dan kelompok usia lanjut dalam mengakses dan merespons informasi desa. Warga dari kalangan usia muda (20 sampai 50 Tahun) tampak aktif mengikuti akun media sosial desa, seperti *Instagram* dan *Facebook*. Mereka kerap membagikan ulang (*repost*) informasi dari akun desa, meninggalkan komentar, serta memberikan respon terhadap konten yang diunggah.

Sebaliknya, warga usia di atas 50 tahun lebih cenderung mengandalkan informasi dari Ketua RT, grup WhatsApp lingkungan, atau melalui forum-forum pertemuan warga seperti arisan, dan rapat warga. Informasi yang disampaikan secara langsung atau melalui media komunikasi sederhana seperti *WhatsApp voice note* dan pesan teks terbukti lebih mudah dipahami oleh kelompok ini. Peneliti juga mengamati bahwa peran tokoh masyarakat sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dengan warga yang kurang familiar dengan media sosial. Ketua RT menjadi aktor kunci dalam menyebarluaskan informasi dari pemerintah desa.

Menurut pendapat peneliti, pemerintah Desa Telukan telah menerapkan strategi komunikasi yang cerdas dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik demografis masyarakat. Untuk kelompok usia produktif (20 sampai 50 tahun), *platform* seperti *Instagram* dan *Facebook* menjadi sarana utama komunikasi karena mereka lebih responsif dan aktif berinteraksi. Sementara itu, kelompok lansia (di atas 50 tahun) yang kurang familiar dengan teknologi tetap terjangkau melalui pendekatan tradisional, seperti grup WhatsApp yang dikelola oleh Ketua RT dan pertemuan tatap muka. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terabaikan dalam proses penyampaian informasi. Namun, tantangan yang masih perlu diatasi adalah kesenjangan kualitas informasi antara *platform* digital dan tradisional. Informasi yang disampaikan melalui *WhatsApp Grop* seringkali tidak lengkap atau terlambat sampai ke lansia. Untuk itu, pemerintah desa perlu mengintegrasikan informasi digital dengan pertemuan rutin, seperti menyampaikan recap informasi di posyandu atau kegiatan lain yang sering dihadiri lansia. Selain itu, pelatihan singkat tentang penggunaan WhatsApp dasar bagi lansia juga dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka.

b. Pembahasan

Penelitian tentang pembentukan opini masyarakat melalui media sosial di Desa Telukan mengintegrasikan perspektif teoritis utama yaitu konstruksi media sosial, dalam membahas tentang pola pembentukan opini publik, transformasi komunikasi Pemerintahan, segmentasi audiens dan pola interaksi sosial dalam media digital.

1. Pola Pembentukan Opini Publik dalam Konteks Digital

Berdasarkan Teori Konstruksi Sosial Media dari Manuel Castells (2009), penyebaran informasi melalui media sosial di Desa Telukan merupakan proses strategis pembentukan realitas sosial yang kompleks. *Platform* digital seperti *WhatsApp Group*, *Instagram*, dan *Facebook* tidak hanya menjadi sarana transfer informasi, melainkan juga menjadi ruang aktif di mana makna sosial diproduksi dan direproduksi. Perangkat desa secara sistematis mengonstruksi narasi tentang pembangunan dan kegiatan desa melalui informasi yang

disajikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami, menciptakan mekanisme komunikasi yang inklusif.

Proses konstruksi sosial media dalam penyebaran informasi memperlihatkan bagaimana perangkat desa bertindak sebagai agen aktif pembentuk opini publik. Informasi tidak hanya disebarluaskan, tetapi dirancang untuk menciptakan pemahaman bersama tentang program

dan kebijakan desa. Castells (2009) menekankan bahwa media digital bukanlah medium netral, melainkan ruang di mana kuasa komunikasi dijalankan. Dalam konteks Desa Telukan, hal ini terlihat dari upaya sistematis menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi yang bukan sekadar pemberitahuan. Pendekatan konstruksi sosial media memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana informasi tidak hanya ditransmisikan, tetapi dikonstruksi, dimaknai, dan diinterpretasikan secara dinamis.

Mengacu pada teori McQuail (2011), penelitian ini mengungkap kompleksitas pembentukan opini publik di era digital. Pemerintah Desa Telukan telah berhasil menciptakan ekosistem komunikasi yang melampaui model komunikasi tradisional, memanfaatkan media sosial sebagai *platform* dialog. Proses pembentukan opini tidak lagi bersifat linier, melainkan multidireksional dan memungkinkan agregasi pikiran dan perasaan masyarakat secara *real-time*.

Teori *agenda setting* McQuail terlihat jelas dalam strategi pemerintah desa. Melalui konten terstruktur yang mencakup aspek sosial, pembangunan, dan pemerintahan. Perangkat desa secara efektif membentuk narasi dan fokus pembicaraan masyarakat. Konten yang disajikan tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi membentuk persepsi publik tentang prioritas pembangunan.

2. Transformasi Komunikasi Pemerintahan

Transformasi komunikasi di Desa Telukan mengalami pergeseran dari komunikasi tradisional ke *platform* digital. Dalam teori yang di ungkapkan oleh Manuel Castells (2009), komunikasi bukan hanya dilihat sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses sosial di mana makna dibangun melalui interaksi antara individu dan kelompok dalam konteks tertentu. Dengan adanya platform seperti WhatsApp, perangkat desa dapat menyebarkan informasi dengan lebih efisien, dan mengubah dinamika komunikasi yang ada.

Komunikasi pemerintahan yang dilakukan di Desa Telukan menunjukkan bagaimana *platform* digital telah menjadi sarana strategis dalam membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat sebagai mana didefinisikan oleh Kaplan & Haenlein (2010), media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang dinamis untuk pertukaran konten dan dialog. Interaksi yang terjadi dalam grup WhatsApp menjadikan ruang dialog yang partisipatif, di mana warga tidak hanya sekadar menerima informasi, tetapi turut berkontribusi dalam membentuk pemahaman kolektif terkait kebijakan dan program pemerintah. Komunikasi digital di Desa Telukan terlihat penuh potensi dalam memperkuat interaksi antara pemerintah dan warganya, dengan mengembangkan teknologi dan strategi komunikasi yang lebih inklusif, dan menciptakan ruang dialog yang lebih efektif.

Implementasinya di Desa Telukan mengadopsi tiga strategi utama dari Khan et al. (2014). Pertama, strategi "*push*" yang memanfaatkan *WhatsApp Group*, *Instagram*, dan *Facebook*

untuk menyebarkan informasi terstruktur seputar kegiatan sosial, pembangunan, dan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan transparansi. Kedua, strategi “*pull*” yang menciptakan ruang interaktif melalui komentar dan respons, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mengurangi hambatan komunikasi antara pemerintah dan warga. Ketiga, strategi “*networking*” yang membangun jaringan komunikasi multilevel dengan pendekatan diferensiatif berdasarkan kelompok usia, sehingga mengatasi kesenjangan digital melalui adaptasi strategi komunikasi.

Konsep *e-governance* UNESCO terwujud dalam pendekatan desa Telukan yang mengadaptasi teknologi informasi sesuai konteks sosio kultural, menciptakan model komunikasi inklusif, dan mentransformasi tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital.

3. Segmentasi Audiens dan Pola interaksi Sosial dalam Media Digital

Dalam perspektif Manuel Castells (2009) tentang ruang digital, media sosial merupakan yang saling terhubung yang membentuk konstruksi sosial. Castells menekankan bahwa dalam “*network society*” setiap kelompok membentuk pola komunikasi unik berdasarkan kapasitas akses dan literasi teknologi. Segmentasi *audiens* yang terjadi di Desa Telukan terlihat dari cara berbeda warga mengakses dan mengolah informasi. Kelompok muda, dengan mudah menggunakan platform digital, sementara kelompok lansia memerlukan jembatan komunikasi melalui tokoh masyarakat.

Konsep kesenjangan digital oleh Castells (2009) tampak nyata dalam konteks desa. Akses dan kemampuan teknologi yang berbeda menciptakan ruang partisipasi yang tidak merata, warga yang lebih familiar dengan teknologi dapat secara aktif membentuk narasi dan makna di ruang digital, sementara kelompok dengan keterbatasan teknologi berisiko termarginalkan. Pemerintah Desa Telukan telah mencoba menjembatani kesenjangan ini melalui strategi komunikasi yang mempertimbangkan karakteristik demografis. Mereka tidak hanya mengandalkan satu saluran komunikasi, melainkan menggunakan berbagai saluran media sosial.

Setiap kelompok di Desa Telukan memiliki cara unik dalam berinteraksi, memahami, dan memaknai informasi yang beredar. Hal ini memperlihatkan dinamika segmentasi *audiens* yang kompleks yang mana perbedaan usia, akses teknologi, dan selera individu membentuk upaya komunikasi digital yang terus berevolusi. Serupa dengan Konsep “*Spiral of Silence*” Noelle-Neumann (1974) tampak dalam dinamika komunikasi digital desa. Meskipun media sosial memberikan ruang terbuka, masih terdapat kecenderungan kelompok lansia pasif dalam mengungkapkan pendapat karena perbedaan kemampuan digital menciptakan hambatan komunikasi tersendiri.

D. Kesimpulan

Penelitian tentang pembentukan opini masyarakat melalui media sosial di Desa Telukan mengungkapkan transformasi fundamental dalam dinamika komunikasi digital di tingkat pemerintahan desa. Melalui perspektif teori konstruksi sosial media, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial tidak sekadar menjadi sarana transfer informasi, melainkan ruang aktif produksi dan reproduksi makna sosial. Pemerintah desa berperan strategis sebagai

agen pembentuk opini publik, merancang informasi secara cerdas untuk menciptakan pemahaman bersama tentang program dan kebijakan desa.

Transformasi komunikasi pemerintahan terlihat jelas melalui penggunaan *platform* digital seperti *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Facebook*, yang mengubah pola komunikasi dari model tradisional menjadi sistem partisipatif dan terbuka. Strategi komunikasi yang diterapkan meliputi pendekatan “*push*” untuk penyebaran informasi, “*pull*” untuk mendorong interaksi, dan “*networking*” untuk membangun jaringan komunikasi lintas kelompok. Pendekatan ini berhasil meningkatkan transparansi, mengurangi hambatan komunikasi, dan menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian ini juga mengungkap kompleksitas segmentasi *audiens* dalam ruang digital, yang dipengaruhi oleh perbedaan akses, kemampuan teknologi, dan karakteristik demografis. Kesenjangan digital menjadi tantangan utama, terutama bagi kelompok lansia yang berisiko termarginalkan dalam komunikasi digital. Namun, upaya pemerintah desa untuk menjembatani kesenjangan ini melalui strategi komunikasi yang fleksibel menunjukkan potensi media sosial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih partisipatif.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. (2022). Profil Demografis Desa Telukan.
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of SocialMedia*.
- Khan, G. F., Swar, B., & Lee, S. K. (2014). Social media communication strategies of government agencies: A cross-cultural comparative analysis. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*.
- Kurniasih, N. (2019). Komunikasi Politik di Tingkat Desa: Pendekatan Personal dan Kontekstual. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory (6th ed.)*. Sage Publications.
- McNair, B. (2011). *An Introduction to Political Communication*. Routledge.
- Mergel, I. (2013). Social media adoption and resulting tactics in the US federal government. *Government Information Quarterly*.
- Mesra, A., & Dolonseda, M. (2023). Pemanfaatan Media Sosial dan *E-commerce* Sebagai Media Pemasaran. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*.
- Nimmo, D. (2010). Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek. Remaja Rosdakarya.
- Noelle-Neumann, E. (1974). *The spiral of silence: A theory of public opinion*. *Journal of Communication*.

- Nuridin, A., & Rusli, M. (2022). Transformasi Digital dalam Komunikasi Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Pratiwi, H., & Nur, E. (2021). Media Sosial dan Dinamika Komunikasi Pemerintahan. *Jurnal Komunikasi Kontemporer*.
- UNESCO. (2020). *E-Governance: Principles and Practices. UNESCO Publications*.
- Wahid, F. (2016). Kredibilitas Kepemimpinan dan Komunikasi Politik di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Wati, H., & Prajarto, N. (2020). Pemanfaatan *WhatsApp Group* oleh Pemerintah Desa. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*.